

Efektivitas Organisasi dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sotol Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2013

Oleh :

Reza Silvianis

Email : rezasilvianis@yahoo.com

Pembimbing : Prof. Dr. H. Sujianto, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Administrasi Publik
Fakultas Sosial dan Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya jl. H.R Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Infrastructure development in reconstructing the village must be able to accommodate the societies' aspirations, apply the societies' active role to participate actively in societies for staying together as villagers. Government has authorities to manage the interests of the societies, but the infrastructure activities that have been realized in the Sotol still entrusted to the private sector as doer.

The problem that was discussed in this thesis was how the organization effectiveness in building the infrastructure in Sotol, Langgam subdistrict Palalawan. Also, the others factor that obstruct the processes.

The method that was used in this research was description qualitative analysis. The collecting data were primer and secondary data. The primer data was gotten from observation and interview some of proper respondents and secondary data was gotten from library study. It also used purposive sampling in determining the sample.

The result of this research was the effectiveness in building infrastructure in Sotol was not good enough yet. It could be seen from building realization which was planned just carried out only two kinds. The factors that influence the monitoring forward the low responsible and awareness about infrastructure building, less of builders, and hard to reach the location. So, the suggestion in this thesis is, because of less fund, it is needed to give job division clearly, transpiration between government and other parties which are involved in societies needs. Also, optimizing the planning about infrastructure building. The government may give explanation clearly about infrastructure, so that sub district and district can control the maintenance of the infrastructure.

Key Word : Village, Organizations, Infrastructure and Development

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya kabupaten/kota dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demikian kemudian lebih akrab disebut Otonomi Daerah. Kehadiran konsep Otonomi Daerah pada era reformasi bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di desa telah memberikan dinamika dan suasana demokratis di dalam pemerintahan desa.

Otonomi pada hakekatnya adalah wujud dari hak mengatur diri sendiri tanpa ada intervensi dari yang lainnya. Sedangkan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakikat Otonomi Daerah adalah upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Kewenangan yang luas dan utuh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan ini, pada akhirnya harus dipertanggung jawabkan kepada pemerintah dan masyarakat. Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan manajemen keuangan daerah yang sehat.

Perkembangan otonomi daerah pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal

tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang dirancang pemerintah untuk pembangunan desa. Hampir seluruh instansi, terutama pemerintah daerah mengakomodir pembangunan desa dalam program kerjanya.

Meskipun demikian, pembangunan desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti adanya desa terpencil atau terisolir dari pusat-pusat pembangunan (*center of excellent*), masih minimnya prasarana sosial ekonomi serta penyebaran jumlah tenaga kerja produktif yang tidak seimbang, termasuk tingkat produktivitas, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Semuanya itu pada akhirnya berkontribusi pada kemiskinan penduduk. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur di desa menjadi aspek yang penting untuk menjawab permasalahan pembangunan desa. Infrastruktur juga memegang peranan yang penting sebagai salah satu penggerak roda perekonomian untuk menopang kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan infrastruktur dalam pembangunan desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa. Hal ini lebih ditegaskan dalam pengaturan mengenai desa yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005. Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa yaitu: Keanekaragaman, Partisipasi, otonomi asli, Demokratisasi, dan Pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya berdasarkan Permendagri No 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia.

Sebagaimana disebutkan pada pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007, karakteristik

pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana pemerintah desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Desa Sotol merupakan salah satu desa yang berada di dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Pelalawan yang memiliki luas 8.700 hektar dengan jumlah penduduk 1.109 jiwa. Sebagian besar penduduk di Desa Sotol adalah petani, hal ini dapat terlihat dari sebagian besar lahan di desa ini digunakan untuk lahan perkebunan sawit dan karet, hal ini dikarenakan kondisi tanah di Desa Sotol.

Jika dilihat dari mata pencaharian masyarakat di Desa Sotol sebagai petani yang

mengolah sawit dan karet, seharusnya dapat digolongkan sebagai sebuah desa yang kaya akan sumber daya alam. Namun kenyataannya saat ini Desa Sotol dapat dikatakan sebagai desa yang tertinggal dalam perkembangan pembangunan infrastruktur. Hal ini dikarenakan akses jalan menuju Desa Sotol sangat kurang sehingga masyarakat sulit untuk keluar masuk desa menjual hasil pertaniannya. Selain itu keadaan iklim dan tanah di desa Sotol juga mengakibatkan masyarakat sulit untuk mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari terutama disaat musim kemarau.

Selain itu jika dilihat dari sarana dan prasarana pendukung yang ada di Desa Sotol dapat dikatakan masih kurang. Hal ini terlihat dari belum adanya gedung pertemuan dan posyandu bagi masyarakat, kurangnya sarana olah raga, rumah ibadah masih banyak yang rusak dan terbengkalai pembangunannya. Tidak adanya tempat penampungan air bersih bagi masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat untuk pendidikan, kesehatan dan keterampilan.

Untuk mengatasi masalah di atas maka diperlukan adanya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah Desa Sotol. Adapun pembangunan infrastrukturnya yang direncanakan oleh pemerintah Desa Sotol berdasarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Sotol, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rencana Pembangunan Infrastruktur di Desa Sotol Tahun 2011-2013

No	Tahun	Jumlah Rencana	Trealisasi	
			Jumlah	Tanggal/Bulan
1	2011	6	0	-
2	2012	10	2	1. 5 Maret – 7 April 2012 2. 26 November – 28 Desember 2012
3	2013	8	0	-

Sumber: Data Hasil Olahan Peneliti

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sotol Tahun 2011-2013, ternyata pemerintah Desa Sotol tidak dapat merealisasikan semua rencana pembangunan infrastruktur yang menyangkut pembangunan sarana dan prasarana di Desa

Sotol. Pemerintah Desa Sotol hanya dapat merealisasikan dua program pembangunan infrastruktur dari tahun 2011 sampai dengan 2013 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2. Realisasi Pembangunan Infrastruktur di Desa Sotol 2011-2013

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	ANGGARAN	TAHUN
1.	Pengaspalan jalan desa sepanjang 3 Km	CV. Balerang	4.000.000.000,-	2012
2.	Pengerasan jalan perkebunan desa sepanjang 2 Km	CV. Kusadiva	170.000.000,-	2012

Sumber: Data Hasil Olahan Peneliti

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pemerintah Desa Sotol hanya mampu merealisasikan 2 pembangunan infrastruktur dalam kurun waktu 2011-2013, dan pembangunan infrastruktur yang direalisasikan tidak sejalan dengan RPJM yang sudah disusun. Hal ini terlihat dari kegiatan pengaspalan jalan desa dan kegiatan pengerasan jalan perkebunan desa. Permasalahan kegiatan pengaspalan jalan desa sepanjang 3 Km tidak sesuai dengan RPJM Desa Sotol yang sudah dibuat, seharusnya direalisasikan pada tahun 2011 bukan pada tahun 2012. Begitu juga dengan masalah penganggaran pada kegiatan ini jauh dari perkiraan yang tercantum dalam RPJM yaitu 2 Miliar, pada pelaksanaannya memakan biaya sebesar 4 miliar. Dan pada kegiatan pengerasan jalan perkebunan desa sepanjang 2 Km pada tahun 2012 yang memakan biaya 170.000.000,- ternyata tidak tercantum dalam RPJM Desa Sotol.

Pada proses pembangunannya, kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur yang sudah direalisasikan pada tahun 2012 dipercayakan kepada pihak swasta sebagai pelaksananya. Hal ini bertentangan dengan pembangunan partisipatif, sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Seharusnya pembangunan infrastruktur harus melibatkan dan memberdayakan semua elemen masyarakat desa. Pada tahun 2011 dan 2013 pemerintah Desa Sotol juga tidak ada kegiatan pembangunan infrastruktur, yang mengakibatkan tidak efektifnya pembangunan infrastruktur dalam kurun waktu 3 tahun (2011-2013).

Bertitik tolak dari latar belakang di atas serta fenomena yang ditemukan di lapangan,

maka penulis tertarik untuk membuat mengetahui efektivitas organisasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sotol Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan faktor-faktor yang menghambatnya.

C. Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”. Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005:109).

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

D. Ukuran Efektivitas

Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985:53) dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian

tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

E. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Agar pencapaian efektivitas itu dapat terwujud, maka perlu memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas organisasi. Richard M. Steers (1985 : 8) mengungkapkan bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas organisasi, yaitu :

a. Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.

b. Karakteristik Lingkungan

Karakteristik lingkungan mencakup dua aspek. Aspek yang pertama adalah lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada diluar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam hal pembuatan keputusan dan pengambilan

tindakan. Aspek yang kedua adalah lingkungan intern, yaitu lingkungan yang secara keseluruhan berada dalam lingkungan organisasi.

c. Karakteristik Pekerja

Karakteristik pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Setiap orang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, kesadaran dari perbedaan setiap orang itulah yang merupakan upaya untuk mencapai suatu tujuan. Jika suatu organisasi menginginkan keberhasilan, maka organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.

d. Karakteristik Manajemen

Karakteristik manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan praktek manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.

F. Pemerintahan Desa

Pengertian Pemerintahan Desa menurut Amin Suprihatini (2007:9) yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan badan perangkat desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan desa.

Wewenang pemerintahan desa yaitu mengatur, mengurus kepentingan masyarakatnya, dan mendamaikan perkara dari para warganya. Pemerintahan desa berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanjadesa dan keputusan kepala desa. fungsi pemerintahan adalah memimpin, memberi petunjuk, memerintah, mengarahkan, koordinasi, pengawasan dan inovasi dalam pemerintah. (Hamdi, 2006:22)

Badan Permusyaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarkat. Anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan Badan Permusyaratan Desa (BPD) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD). Masa jabatan anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan Badan Permusyaratan Desa (BPD) diatur dalam Perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah.

G. Infrastruktur

Pengertian Infrastruktur, menurut Grigg (1988) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.

Infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai

dasar-dasar dalam mengambil kebijakan (Kodoatie, 2005).

Infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. Sedangkan fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat disebut sebagai sistem infrastruktur. Sistem infrastruktur juga merupakan proses dengan keterlibatan berbagai aspek, interdisiplin, dan multi sektoral. Salah satu tantangan dalam perancangan sistem infrastruktur adalah mempertimbangkan bagaimana semua memberikan pengaruh pada lainnya, keterikatan satu sama lain dan dampak-dampaknya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis, Ruang Lingkup, dan Lokasi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menghasilkan data berdasarkan fenomena alamiah dan berusaha mencari kebenaran secara alami. Dengan jenis peneltian deskriptif kualitatif ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas oraganisasi dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sotol Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-203.

b. Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terfokus pada efektivitas oraganisasi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sotol pada tahun 2011 sampai 2013 dan faktor-faktor yang menghambatnya.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data Primer adalah data yang diperoleh dengan hasil pengamatan penelitian yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi yaitu informasi yang terkait dengan efektivitas pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sotol pada

tahun 2011 sampai 2013 dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Data Sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan seperti, putusan hukum, literatur-literatur, surat kabar elektronik, dan lampiran data-data lain yang dipublikasikan yang mana dapat mendukung dan menjelaskan masalah penelitian.

b. Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu subjek penelitian menjadi informan. Adapun informan kunci penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi pembangunan desa, kepala LPM, dan masyarakat desa Sotol.

3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini memusatkan perhatian secara intensif terhadap suatu objek tertentu. Setelah data dikumpulkan maka diperlukan pengolahan atau teknik analisis data agar bisa dijadikan data yang lengkap kemudian dikelompokkan menurut jenis dan macam data serta ditambahkan dengan keterangan-keterangan yang bersifat mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian dengan analisis deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Dalam hal ini penulis menganalisis data-data tersebut yang didapat dari informan yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan.

Data yang telah dikumpulkan perlu dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dalam penelitian guna mendapat suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan analisis deskriptif diharapkan penelitian ini mampu menjelaskan fakta empiris yang ada secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas Organisasi dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Sotol

1. Pencapaian Tujuan Organisasi

a. Perencanaan

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan

memperhatikan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan harus dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya termasuk aspek pengawasan.

Perencanaan pembangunan di Desa Sotol dilakukan dengan adanya musyawarah masyarakat, dalam hal ini biasanya musyawarah harus dihadiri oleh LPM, BPD, perangkat desa lainnya (RT/RW) dan tokoh masyarakat. Dalam musyawarah tersebut akan ditentukan beberapa rencana program pembangunan yang perlu untuk dilaksanakan, kemudian akan diambil kesimpulan beberapa program yang harus diprioritaskan untuk dilaksanakan dalam jangka waktu cepat. Keputusan yang telah ditetapkan dapat diterima dengan ketentuan bahwa peserta yang hadir dalam musyawarah lebih dari 50% undangan yang telah dibagikan. Sehingga dengan adanya hasil musyawarah tersebut, maka program yang telah direncanakan tersebut akan disusun dalam laporan RPJMdes. Dalam penentuan akhirnya akan ditentukan oleh pihak kabupaten terhadap usulan laporan yang diajukan.

b. Pembagian tugas

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan desa yang dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang desa dilakukan dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des). Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Des dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Des.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan diukur dari pencapaian target dari perencanaan pembangunan. Manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan pembangunan ini adalah dapat

meningkatkan hasil pertanian dan memudahkan pendistribusian hasil pertanian baik menuju tempat penjualan hasil pertanian ke daerah maupun ke luar kota dan pada akhirnya memiliki tujuan untuk meningkatkan geliat perekonomian di desa dan tentunya pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa Sotol.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sotol secara umum belum mencapai target yang diinginkan. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sotol saat ini baru terlaksana 2 program. Hal ini berdasarkan Laporan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) periode 2011-2013 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1. Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) Periode Tahun 2011-2015 yang Terlaksana

No	Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan
1	Pengerasan jalan perkebunan sepanjang 2 KM	Dusun 1 dan 2	2012
2	Pengaspalan jalan desa sepanjang 3 KM	Dusun 1 dan 2	2012

Berdasarkan data lapangan diketahui bahwa infrastruktur seperti saran pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi sudah cukup memadai meskipun dari segi kondisi sarana dan prasarana desa seperti kantor desa yang sering kosong, sarana Poskesdes yang tidak memiliki gedung dan sarana olahraga yang tidak memiliki tribun.

d. Pengawas

Pengawasan dilakukan berdasarkan rencana pembangunan yang digunakan untuk mengetahui tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan. Pengawasan dilakukan oleh pimpinan kementerian/lembaga/SKPD terhadap pelaksanaan pembangunan. Pengawasan berfungsi untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintah desa berjalan dengan baik. Pengawasan berjalan dengan baik jika tata cara pengawasan dilaksanakan sesuai dengan wewenang dan tugasnya untuk meninjau realisasi penyerapan dana dalam pelaksanaan pembangunan.

Pihak pemerintah kecamatan juga merupakan pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan kecamatan adalah suatu proses atas penyelenggaraan pemerintahan desa yang

bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintah desa berjalan dengan baik dan berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2006. Pengawasan yang dilakukan kecamatan bertujuan untuk memonitoring kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Pelaksanaan pembagunan dapat berjalan dengan efisien, efektif dan akuntabel jika dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembagunan tersebut. Pengawasan berjalan dengan baik jika tata cara pengawasan dilaksanakan sesuai dengan wewenang dan tugasnya untuk meninjau realisasi penyerapan dana dalam pelaksanaan pembangunan.

Perencanaan dapat berjalan dengan baik jika didukung dengan pengawasan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Hasil pembangunan infrastruktur atau realisasi penyerapan dana pada pelaksanaan pembangunan di Desa Sotol Masih belum mencapai target yang ditetapkan sesuai dengan rencana.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan, penulis menemukan bahwa pemerintah Desa Sotol dan pemerintah Kecamatan Langgam serta pihak Kabupten Pelalawan telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur yang berlangsung ada di desa. Pengawasan telah

dilakukan berdasarkan tugas masing-masing urusan yang memiliki kewajiban bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang ada di desa, namun pengawasan ini belum berdampak maksimal terhadap pembangunan infrastruktur yang ada. Dalam pengawasan sendiri kegiatan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja akan diberi teguran dan harus memperbaiki hasil kerjanya sesuai dengan yang ada dalam kontrak kerja, apa bila tidak sesuai maka pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor tidak akan bisa melakukan pencairan dana yang ada dalam kontrak kerja.

2. Integrasi Organisasi

a. Sosialisasi

Integritas dapat dikatakan sebagai proses yang menyangkut tentang hubungan suatu organisasi tertentu dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Integritas merupakan pengukuran yang dilakukan terhadap tingkat kemampuan yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Sosialisasi merupakan hal yang utama dalam pelaksanaan dan pengembangan suatu organisasi, sehingga dengan adanya sosialisasi yang baik akan memancing timbulnya komunikasi yang baik pula. Tingkat efektivitas itu sendiri dapat ditentukan oleh terintegrasinya sasaran dan kegiatan organisasi secara menyeluruh, kemampuan penyesuaian dari organisasi terhadap perubahan lingkungannya.

Pembangunan infrastruktur desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan jika sosialisasi program pembangunan dijalankan dengan baik. Sosialisasi tentang program pembangunan infrastruktur pedesaan kepada masyarakat selalu dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam hal ini, Kepala Desa, sekretaris desa dan juga aparat desa dalam setiap kesempatan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Lembaga Masyarakat Desa yang terdiri dari Ketua dan anggotanya selalu membantu pemerintah dalam upaya memberikan informasi kepada masyarakat desa Sotol tentang aspek-aspek serta manfaat dan

kegunaan adanya program pembangunan infrastruktur pedesaan tersebut.

b. Pengembangan konsensus

Pengembangan konsensus merupakan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antara kelompok atau individu setelah adanya perdebatan. Pelaksanaan kegiatan pembangunan pada dasarnya adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat. Peran pemerintah lebih bersifat memfasilitasi, sedangkan pada tingkat masyarakat yang dibutuhkan adalah partisipasi. Artinya keberhasilan dari berbagai program yang ditujukan kepada masyarakat sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat.

Menurut Komisi Brundland dalam John Clark (1996), bahwa salah satu prasyarat utama terjadinya pembangunan berkelanjutan adalah menjamin efektifitas partisipasi dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan, bahwa partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat tidak hanya sekedar mengikuti kegiatan yang telah diprogramkan, tetapi lebih bersifat menyeluruh mulai dari penentuan/perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemanfaatan hasil suatu kegiatan.

c. Komunikasi

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dapat berjalan dengan baik apabila semua elemen yang kompeten dalamnya mampu untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Oleh sebab itu, peranan masing-masing elemen pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan pedesaan sangat dibutuhkan dalam pembangunan desa tersebut. Pelaksanaan pembangunan tersebut akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan apabila terjalin komunikasi yang baik antara elemen masyarakat.

3. Adaptasi Organisasi

Adaptasi dalam program pembangunan infrastruktur pedesaan merupakan bagian dari kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat, bentuk konkritnya adalah tersedianya akses prasarana lokal yang lebih memadai dapat dimanfaatkan secara langsung dan cepat oleh

masyarakat, disamping itu manfaat lain yang dapat diperoleh adalah dalam bentuk peningkatan ketrampilan (*human investment*) di dalam penyelenggaraan prasarana lokal.

Pemerintah kabupaten pelalawan dan pemerintah kecamatan Langgam, khususnya pemerintah desa Sotol telah melakukan adaptasi terhadap program pembangunan infrastruktur desa salah satu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang desa). Penyesuaian program pembangunan infrastruktur Desa Sotol ini kemudian di musyawarahkan melalui Musrenbang desa yang kemudian diusulkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan. Musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapat masukan dari bawah mengenai kegiatan prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan yang didasarkan kepada usulan dan masukan yang didapat dari desa/kelurahan. Masukan tersebut sekaligus menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan kecamatan yang akan diajukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disesuaikan terhadap pembangunan yang akan dilakukan.

Pelaksanaan musrenbang kecamatan adalah untuk merangkum seluruh kebutuhan masyarakat dalam hal ini segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang diajukan dari bawah yaitu pemerintah desa/kelurahan setelah melakukan penyelidikan, kemudian dilakukan penyusunan apa yang akan dilakukan, pada proses ini merupakan proses membuat keputusan yang lebih utuh dari perencanaan awal, umumnya rencana tindakan akan memuat apa yang hendak dicapai, kegiatan yang hendak dilakukan, pembagian tugas atau pembagian tanggung jawab, dan waktu. Oleh sebab itu untuk menyusun langkah yang baik, maka diperlukan kejelasan rumusan pernyataan yang jelas, dan penyesuaian program dan kebutuhan infrasturuktur.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Organisasi dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Sotol

1. Karakteristik Organisasi

Karakter organisasi mampu mempengaruhi efektivitas organisasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur karena mempunyai sifat yang relatif tetap. Karakter yang terdapat dalam sebuah organisasi merupakan suatu susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi tersebut. Sumber daya manusia akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang terjadi pada suatu organisasi tersebut. Struktur dalam sebuah organisasi akan menempatkan manusia pada suatu hubungan yang bersifat relatif tetap. Sedangkan struktur merupakan suatu cara dalam menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi.

Secara keseluruhan pembangunan infrastruktur di Desa Sotol telah terorganisir dengan baik oleh aparat desa dan kerjasama para masyarakat Desa Sotol. Meskipun demikian disisi lain masih terdapat adanya sebagian kecil masyarakat yang masih memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran terhadap pembangunan infrastruktur di desa Sotol.

Selain itu faktor yang menyebabkan terbengkalainya proyek-proyek infrastruktur di Desa Sotol, diantaranya adalah kurangnya komunikasi dan tidak sinkronnya masing-masing bagian masyarakat terhadap pembangunan dsea serta faktor lain adalah kurangnya pengawasan. Hal dikarenakan pemerintah tingkat desa tidak mendapat kewenangan tertulis dari bupati untuk ikut mengawasi jalannya proyek tersebut.

2. Karakteristik Lingkungan

Efektifitas suatu organisasi juga dipengaruhi oleh karakteristik lingkungan. Dimana karakteristik lingkungan merupakan cara yang ditempuh oleh sebuah organisasi dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya. Karakteristik lingkungan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu lingkungan ekstren dan intern. Lingkungan ekstren

merupakan lingkungan yang berada di luar organisasi, dimana lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap suatu organisasi, suatu tindakan yang dilakukan akan berdampak terhadap keputusan atau hasil yang diinginkan. Sedangkan lingkungan intern merupakan lingkungan yang berada dalam organisasi itu sendiri. Sehingga suatu kesepakatan yang dilakukan dipengaruhi oleh lingkungan yang ada dalam organisasi itu.

Terlepas dari kebutuhan-kebutuhan infrastruktur pedesaan, terdapat pula hambatan-hambatan berdasarkan kondisi dan karakteristik wilayah dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur pedesaan. Dari hasil survey dapat dijelaskan bahwa hambatan-hambatan yang ada dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur berdasarkan karakteristik wilayah adalah: untuk infrastruktur jalan, perumahan dan listrik lebih cenderung kepada kewenangan pengelolaan dan keterbatasan dana, untuk air bersih berkaitan dengan teknis pengelolaan sedangkan untuk irigasi berhubungan dengan ketersediaan infrastrukturnya, serta akses jalan menuju ke Desa Sotol yang sulit terjangkau dan kondisi ini ditambah lagi dengan kurang baiknya kondisi jembatan yang digunakan langsung untuk mencapai desa tersebut.

Jauhnya akses menuju ke Desa Sotol menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas organisasi dalam melaksanakan pembangunan Infrastruktur di Desa Sotol. Kondisi jembatan yang sudah lama dan tidak dapat lagi untuk menahan beban yang berat berdampak pada kekhawatiran pada masyarakat. Kondisi lainnya yang adalah akses jalan menuju ke desa yang cukup jauh dan kondisi jalan yang baru dilakukan pengerasan mengakibatkan jika terjadi hujan, jalan menjadi susah untuk dilalui.

3. Karakteristik Pekerja

Karakteristik pekerja merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap efektifitas suatu organisasi. Pekerja merupakan seorang yang mempunyai karakteristik tersendiri dan berbeda dengan pekerja lainnya. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka harus adanya kesadaran

tersendiri dari pekerja tersebut. Adanya perbedaan antara tujuan individu dengan tujuan dari sebuah organisasi akan menjadi penghalang untuk terciptanya tujuan yang diinginkan.

Perencanaan pembangunan desa harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks tadi, sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya alam, keuangan, serta sumber-sumber daya yang lainnya. Dalam konteks ini ia menyebutnya dengan istilah pembangunan *endogen*, atau dengan kata lain pembangunan yang berbasis potensi, perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu proses atau tahapan pengarahan kegiatan pembangunan di suatu wilayah tertentu yang melibatkan interaksi antar sumber daya manusia dengan sumber daya lain, termasuk sumber daya alam dan lingkungan melalui investasi.

4. Karakteristik Manajemen

Kesatuan tujuan dan keinginan antara pekerja dalam menjalankan tugasnya akan memberikan hasil yang lebih baik apabila ada manajemen yang mengatur dengan baik sebuah pekerjaan atau organisasi. Karakteristik manajemen merupakan mekanisme atau cara yang dilakukan dan dirancang untuk melakukan semua hal yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk tercapainya efektifitas. Manajemen dapat berjalan dengan baik sebuah organisasi memiliki sarana atau tempat bernaungnya organisasi tersebut. Desa Sotol telah memiliki kantor yang cukup memadai untuk menjalankan organisasi pemerintahan desa.

Kewenangan pembangunan infrastruktur di Desa Sotol menjadi tanggungan seluruh kalangan tidak hanya terbatas pada aparat pemerintah Desa Sotol melainkan seluruh pihak termasuk di dalamnya tanggung jawab kabupaten dan dinas teknis terkait, hal tersebut berkaitan dengan fungsi dan tugas pemerintah, juga besarnya dana yang harus dikeluarkan untuk pembangunannya. Luasnya cakupan wilayah yang memerlukan pembangunan

infrastruktur dan keterbatasan dana membatasi kuantitas serta jenis infrastruktur yang hendak dibangun, pemerintah hanya membangun sebatas kewenangan dan kemampuannya sehingga kebutuhan infrastruktur pedesaan belum bisa dilaksanakan keseluruhan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efektifitas organisasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sotol dari segi pencapaian tujuan pembangunan masih terdapat kekurangan yang ditinjau dari segi perencanaan, pembagian tugas, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan pembangunan dilakukan dengan adanya musyawarah masyarakat, yang dihadiri oleh LPM, BPD, perangkat desa lainnya (RT/RW) dan tokoh masyarakat.

Pembagian tugas dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan desa yang dilakukan melalui Musrenbang. Musrenbang desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) desa untuk menyepakati RKP Desa tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang desa dilakukan dengan mengacu kepada dokumen RPJM Des. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Des dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Des.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur belum sejalan dengan RPJM. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sotol saat ini baru terlaksana 2 program yaitu pengerasan jalan perkebunan sepanjang 2 KM dan pengaspalan jalan desa sepanjang 3 KM yang berada pada dusun 1 dan 2 yang terealisasi pada tahun 2012.

Pengawasan dilakukan berdasarkan rencana pembangunan. Pemerintah Desa Sotol dan pemerintah Kecamatan Langgam serta pihak Kabupten Pelalawan telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan

infrastruktur yang berlangsung ada di desa. Pengawasan telah dilakukan berdasarkan tugas masing-masing urusan yang memiliki kewajiban bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang ada di desa, namun pengawasan ini belum berdampak maksimal terhadap pembangunan infrastruktur yang ada.

Dari segi integritas terlihat bahwa efektivitas organisasi dalam pembangunan infrastruktur di desa sotol dilihat dari sosialisasi, pengembangan konsesus dan komunikasi. Sosialisasi tentang program pembangunan infrastruktur pedesaan kepada masyarakat sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam hal ini, Kepala Desa, sekertaris desa dan juga aparat desa dalam setiap kesempatan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Lembaga Masyarakat Desa yang terdiri dari ketua dan anggotanya selalu membantu pemerintah dalam upaya memberikan informasi kepada masyarakat desa Sotol tentang aspek-aspek serta manfaat dan kegunaan adanya program pembangunan infrastruktur pedesaan tersebut. Pengembangan konsensus merupakan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antara kelompok atau individu setelah adanya perdebatan pengembangan konsensus ini menjadi tanggung jawab pemerintah desa bersama masyarakat. Peran pemerintah lebih bersifat memfasilitasi, sedangkan pada tingkat masyarakat yang dibutuhkan adalah partisipasi. Integritas organisasi dalam pembangunan infrastruktur desa, komunikasi masyarakat dan aparat pemerintah desa telah dituangkan dalam Musrenbang, dalam Musrenbang tersebut akan diketahui pembangunan apa yang akan dipentingkan atau didahulukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah kabupaten pelalawan dan pemerintah kecamatan Langgam, khususnya pemerintah Desa Sotol telah melakukan adaptasi terhadap program pembangunan infrastruktur desa salah satu melalui Musrenbang desa. Penyesuaian program pembangunan infrastruktur Desa Sotol ini kemudian di musyawarahkan dan kemudian diusulkan dalam musyawarah

perencanaan pembangunan kecamatan, dan masukan tersebut sekaligus menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang disesuaikan terhadap pembangunan yang akan dilakukan.

Faktor-faktor yang menghambat efektifitas organisasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Sotol adalah masih terdapat adanya sebagian kecil masyarakat yang masih memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Sotol. Faktor karakteristik lingkungan juga menjadi faktor yang mendasar dalam menghambat pembangunan Desa Sotol. Faktor penghambat lainnya adalah masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di desa sotol. Keterbatasan dana desa dan banyaknya kebutuhan infrastruktur pedesaan yang harus segera ditangani, juga menjadi salah satu faktor yang menghambat efektifitas organisasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Sotol.

B. Saran

1. Keterbatasan dana desa dan banyaknya kebutuhan infrastruktur pedesaan yang harus segera ditangani, sehingga diperlukan titik temu dan pembagian kewenangan yang jelas, transparan dan memihak masyarakat antara Pemerintahan atau dinas teknis lainnya berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di desa.
2. Dalam rangka mengoptimalkan perencanaan pembangunan Infrastruktur Pedesaan agar menghasilkan perencanaan infrastruktur pedesaan yang efektif dan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat desa maka diperlukan arahan untuk perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan.
3. Dalam hal pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada, dinilai masih kurang. Sehingga membutuhkan peranan pihak kecamatan atau kabupaten dalam mengontrol secara berkala agar pemeliharaan infrastruktur dilaksanakan

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penilaian Suatu Panduan Praktis*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Deddy T. Tikson. 2005. *Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Lyberti.
- Georgopolous dan Tannenbaum. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Handayaninrat, Soerwarno. 1994. *Pengantar Ilmu Administrasi Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Meleong, Lexy. J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya,
- Mubyarto. 2004. *Strategi pembangunan yang Berkeadilan*. Yogyakarta: Yayasan Mulia Bangsa.
- Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Kartono Kartini. 2006, *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Jakarta : Raja Grafindo persada.
- Karyadi. 1998. *Teori & Praktek Kepemimpinan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Kodoati, Robert, J. 2005. *Pengaturan Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- R.D Agarwal. 1982. *Seni Kepemimpinan Dalam Organisasi*, Jakarta: Bumi Aksara
- Shephen, Robbin. Terjemahan Yusup Udayana. 1995. *Teori Organisasi Siruklur Desain dan Aplikasi*. Jakarta: Alcan
- Siagian S.P, 2004, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Ghalia Indonesia,.
- Steers, Ricard M. 1986. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga

- Thoha, Miftah. 2007. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Press.
- Trisantono, Soemantri, Bambang. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Suatu Pengantar Tugas bagi Penyelenggaraan Pemerintahan desa Secara Normative dan Komprehensif)*. Jakarta: Fokus Media.
- Usman, Santoyo. 2003. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.